

## **MAKNA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – FILIPINA BAGI MASYARAKAT MIANGAS**

Oleh :  
Echoristy Jandry Mamintada

### **ABSTRACT**

*The border problem is a crucial issue for a country especially if the country geographically has boundaries adjacent to neighboring countries either directly (mainland) or indirect (sea).*

*In 2002, the Indonesian side was shocked by the decision of the International Court of Justice in The Hague on the status of Sipadan and Ligitan islands whose ownership fell to the State of Malaysia. As a result Indonesia lost two outer islands bordering its neighboring countries. As an archipelagic country, Indonesia now has 92 islands bordering neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Philippines, Australia, Timor Leste and Papua New Guenia. There are concerns that occurred after the release of the two islands, what about the status of other outer islands will be the same fate with Sipadan and Ligitan islands. One of the islands is Miangas Island which is administratively included in North Sulawesi territory and directly adjacent to territory of Philippine country. To answer the concerns, the local government of Talaud Islands Government and the central government of the Republic of Indonesia began to imply on the island of Miangas by building facilities and infrastructure, especially in supporting border facilities as a symbol of state power over the island.*

*The research method used in this research is descriptive qualitative which is generally used by social sciences one of them is anthropology which focused on phenomenology that is searching meaning in a phenomenon.*

*This study aims to reveal the meaning contained in the development of Indonesia-Philippine border region and to find out whether the development is in accordance with the characteristics of Miangas community itself or just for political purposes by ignoring the condition of the local community*

*Keywords: Border, Miangas, Development*

## PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia membentang dari 6°8' LU hingga 11°15' LS dan 94°45 BT hingga 141°05'BT dan secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera yaitu samudera Indonesia dan samudera Pasifik. Secara keseluruhan Indonesia terdiri dari sekitar 17.504 pulau yang terintegrasi dan di antara keseluruhan pulau tersebut baru 13.466 pulau yang telah diberi nama dan didaftarkan di PBB dan kurang lebih 6000 pulau diantaranya yang berpenduduk. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,937 juta km<sup>2</sup>, luas kedaulatan 3,1 juta km<sup>2</sup> (Indonesia dalam angka 2015), dan luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km<sup>2</sup>. Indonesia kini memiliki wilayah laut, termasuk ZEEI, seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> yang merupakan tiga per empat dari total wilayah serta garis pantai sepanjang 95.000 km terpanjang kedua setelah Kanada (Dahuri, 2015).

Indonesia apabila dilihat dalam peta dunia dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, seakan menggambarkan sebuah

rentetan pulau yang sejajar dan menurut Deniss Lombart, seorang sejarawan dalam bukunya *Nusa Jawa: Silang Budaya – Batas-Batas Pembaratan* menyatakan *Laut yang tampaknya memisahkan, sebenarnya juga mempersatukan. Hubungan ekonomi dan kebudayaan lebih sering terjadi diantara pantai yang satu dan pantai yang lain daripada di antara suatu daerah dan daerah lain di pulau yang sama* (Lombart, 1996:14). Posisi Indonesia yang strategis dalam perlintasan internasional ditunjang oleh posisinya yang seperti dikatakan di atas bahwa Indonesia dikelilingi oleh dua benua dan dua samudera. Letak dan posisi geografis ini membuat Indonesia memiliki banyak daerah-daerah perbatasan dengan Negara tetangga baik berupa pulau maupun dengan daratan.

Provinsi Sulawesi Utara yang secara administratif berada di kawasan Indonesia Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 mengoleksi 11 pulau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina. Kesebelas pulau tersebut adalah pulau Miangas, pulau Kakorotan,

pulau Intata, pulau Makalehi, pulau Marampit, pulau Marore, pulau Kawio, pulau Kawalusu, pulau Mantehage, pulau Batu Bawaikang dan pulau Bongkil (Salindeho & Sombowadile, 2008). Pulau-pulau tersebut berada di lima kabupaten yaitu; Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau Tagu-landang dan Biaro), Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berbeda dengan pulau-pulau yang lainnya, Miangas dan Marore memiliki ketertarikan tersendiri (Bukan berarti pulau-pulau yang lain tidak menarik) karena berada dalam jarak yang lebih dekat dengan negara tetangga Filipina.

Karakteristik wilayah perbatasan menurut Soegijoko (1994) seringkali dideskripsikan sebagai wilayah terluar yang terisolir, terkebelakang dan penuh dengan segudang permasalahan menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya berada dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Namun dalam hal ini yang seringkali dilupakan bahwa kehidupan masyarakat di wilayah

perbatasan tidak selamanya tergolong dalam penamaan di atas, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda dalam pola hidup mereka. Miangas misalnya, merupakan salah satu dari 92 pulau terluar dan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Filipina mempunyai tradisi tersendiri bagaimana bertahan hidup dalam kondisi keterisolasian dan keterbelakangan hingga adanya pembangunan yang signifikan dari pemerintah daerah (Hoetagaol, dkk, 2013).

Wilayah perbatasan sebagai garis pangkal penentu kedaulatan NKRI perlu adanya perhatian khusus pemerintah baik dari segi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur serta pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menjawab pertanyaan sekaligus kekuatiran di atas, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan berbagai pembangunan sebagai bentuk perhatian dari NKRI. Pembangunan tersebut seperti empat buah tugu sebagai penanda supremasi kedaulatan NKRI yaitu, tugu Santiago, tugu Perbatasan, tugu Benteng Pancasila dan sebuah tugu yang belum rampung

sampai sekarang yang dibangun pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, pembangunan lainnya seperti: Kantor Perhubungan, Kantor Navigasi, Kantor Keca-matan Khusus, Kantor Koramil, Kantor Marinir, Kantor Imigrasi, Kantor Perbatasan, Kantor Dikpora, Kantor Perpustakaan, PLTS bantuan Menhan, Pos Pertamina, kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manado, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Miangas dari Departemen Kese-hatan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Anaada, 2013). Yang paling terakhir dibangun adalah pemba-ngunan Bandar Udara yang telah diresmikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2016 (Tempo, 19 Oktober 2016). Dari beberapa fasilitas yang disebutkan di atas, dilengkapi dengan personil adalah fasilitas yang dibangun dalam rangka kerja sama antar kedua Negara seperti petugas keimi-grasian, Bea Cukai, Marinir dan Posal dari kedua Negara. Fasilitas-fasilitas aparatur sipil yang dibangun untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat

hanya terbengkalai dan dibiarkan kosong akibatnya rusak dan terkesan hanyalah proyek yang mubazir. Contohnya, kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manado, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Miangas dari Departemen Kesehatan dan Kantor Kepala Desa (Anaada, 2013). Ketika pembangunan kawasan per-batasan marak di Miangas, muncul sejumlah per-tanyaan seputar efektivitas pelaksanaan pemba-ngunan tersebut. Pertanyaan tersebut didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan program. Akibatnya pembangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai-mana fungsinya seperti yang telah diuraikan di atas.

### **Konsep Makna**

Sedangkan menurut Bam-bang Tjiptadi, makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu (Tjiptadi, 1984:19). Ada beberapa

istilah yang berhubungan dengan pengertian makna kata, seperti makna donatif, makna konotatif, makna leksikal, makna gramatikal. Namun dalam hal ini tidak akan dibahas lebih jauh tentang makna dalam koridor linguistik karena penelitian ini lebih mengarah ke antropologis.

### **Makna Sebagai Kebudayaan**

Berbeda dengan beberapa istilah yang berhubungan dengan makna di atas, Clifford Geertz justru melihat makna sebagai kebudayaan. Dalam bukunya *Tafsir Budaya*, Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu system yang tertata dari simbol-simbol dan makna, dimana dari tatanan tersebut terdapat kerangka dari berbagai kepercayaan, lambang-lambang ekspresif yang memungkinkan manusia menafsirkan pengalamannya serta menuntun perilakunya (Geertz,1992). Dalam usahanya untuk memahami kebudayaan, ia melihat kebudayaan sebagai teks sehingga perlu dilakukan penafsiran untuk menangkap makna yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan dilihatnya sebagai jaringan makna simbol yang dalam penafsirannya perlu di-

lakukan suatu pendeskripsian yang sifatnya mendalam (*thick description*). Karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan. Dari pengertian di atas, Geertz mengambil contoh pertarungan ayam di Bali. Ia menafsirkan sebuah ayam yang bertarung bukan hanya sekedar ayam, namun disitu ada multi tafsir yang ditafsirkan oleh masyarakat sekitarnya (Bali). Seperti pertarungan harga diri, kehormatan, jabatan, dan kasta.

Oleh karena itu Geertz menyarankan kepada ilmuwan sosial khususnya antropolog agar dalam melihat suatu peristiwa sosial; dan fenomena budaya dalam masyarakat jangan ditelaah secara kausalitas (sebab-akibat) melainkan dilihat sebagai sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang bermakna ini sesungguhnya adalah apa yang oleh Marvin Harris dalam Kusen (2014) sebut "emik". Artinya, menurut apa yang ada dalam pikiran dan atau yang diketahui oleh masyarakat sekitar bukan dari peneliti.

Kessing dalam Kusen (2014) membagi makna kebudayaan dalam dua kategori yaitu pertama, makna kebudayaan dipandang sebagai pola dari perilaku, digunakan mengacu kepada pola kehidupan suatu kehidupan sosial masyarakat. Menyangkut kegiatan, regulasi sosial maupun material (rumah dan peralatan hidup) yang berkembang secara teratur merupakan karakteristik dari masyarakat yang bersangkutan dalam konteks etnik tertentu. Berdasarkan pengertian ini, kebudayaan merupakan fenomena peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan sosial dan benda-benda yang dapat diamati (*behaviorsm*). Kedua, makna kebudayaan dipandang sebagai pola untuk perilaku, digunakan mengacu kepada suatu sistem pengetahuan dan kepercayaan yang dikonstruksi secara sosial (melalui sosialisasi) sebagai pedoman manusia dalam menelaah atau menginterpretasi pengalaman, persepsi mereka, menentukan tindakan dan memilih di antara alternatif yang ada. Berdasarkan pengertian ini, kebudayaan pada prinsipnya mengacu kepada dunia gagasan/ide (*cognitivism*).

### **Konsep Pembangunan**

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Menurut Parsudi Suparlan, pembangunan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal, yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang secara terencana merubah cara-cara hidup dan kebudayaan dari sesuatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik dan sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut (Suparlan, 1997).

### **Konsep Kawasan Perbatasan**

Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Kawasan Perbatasan diartikan sebagai bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Sedangkan Soegijoko (1994) memberi batasan wilayah perbatasan merupakan wilayah khusus karena berbatasan dengan wilayah Negara tetangga, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan. Pada umumnya daerah perbatasan nasional merupakan bagian wilayah terpencil dan rendah aksesibilitasnya oleh mode transportasi umum, terbelakang dan masih belum berkembang secara mantap, kritis dan rawan dalam ketertiban dan keamanan.

### **Konsep Masyarakat**

Secara etimologi masyarakat berasal dari bahasa Inggris *society* dan dari bahasa Latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman. Istilah masyarakat sendiri berasal dari

akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi" (Koentjaraningrat 2009:116), sehingga arti *society* dihubungkan erat dengan kata sosial, dimana dalam masyarakat tergambar pola-pola hubungan seperti interaksi sosial, perubahan sosial dan nilai-nilai sosial. Untuk memahami lebih lanjut mengenai masyarakat (*society*), Menurut Koentjaraningrat seorang guru besar Antropologi UI, masyarakat didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas tertentu (Koentjaraningrat, 2009).

### **Makna Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia–Filipina Bagi Masyarakat Miangas**

Berbicara tentang makna berarti berbicara tentang apa yang ada dibalik sesuatu tersebut. Sedangkan kata makna pembangunan berarti apa yang ada dibalik pembangunan itu sendiri. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang besar mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini

meliputi segala aspek kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Melakukan pekerjaan yang besar ini menuntut keuletan, ketangguhan, kecerdasan dan kecermatan yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai keahlian, berbagai pengetahuan, dan berbagai ilmu wajib diterapkan dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang luas yang terdiri dari corak ragam kondisi fisik dan non fisik.

Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Pembangunan sendiri terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010). Pembangunan fisik berupa Infrastruktur, bangunan serta fasilitas umum. Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai.

Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah sekaligus dibantu masyarakat. Sehingga pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas (*controlling*) ataupun sebagai perencana dan pelaksana, sedangkan peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga kedua komponen tersebut saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan lancar. Selain sumber daya alam, sumber daya manusiapun dapat juga ikut menyumbangkan dalam

kegiatan pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) disini dalam arti masyarakat ikut andil dalam kegiatan pembangunan, baik pikiran maupun tenaga. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan berbagai daya cipta, rasa, dan karsa. Oleh sebab itu peran serta manusia dalam pembangunan memberikan sumbangsih yang terbesar dalam melaksanakan pembangunan. Sikap manusia dalam mengisi pembangunan tentu saja harus memperhatikan aspek – aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan aspek – aspek lingkungan. Aspek lingkungan perlu diperhatikan agar manusia tidak semena – mena dalam memberlakukan alam, sehingga pembangunan yang semula direncanakan dapat terealisasi. Jangan sampai manusia melakukan suatu pembangunan, namun disisi lain tindakan manusia tidak memperhatikan aspek lingkungan akan berakibat pembangunan tersebut tidak akan berhasil ataupun menjadi sia-sia. Oleh karena itu, berhasilnya suatu pembangunan tergantung pada peran serta masyarakat, dalam arti

mengisi pembangunan semaksimal mungkin bersama – sama dengan pemerintah, serta memperhatikan aspek – aspek yang berkaitan dengan pembangunan ataupun berkaitan dengan aspek lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Pulau Miangas dengan status kecamatan khusus merupakan salah satu kecamatan yang unik, mengapa tidak, karena dalam satu wilayah kecamatan tersebut hanya ada satu kampung yang berstatus desa yaitu desa Miangas. Sejauhmana makna pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Filipina bagi masyarakat Miangas, sebagai pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina, pembangunan di Miangas sedang marak-maraknya seperti yang sedang terjadi sekarang yaitu pembuatan jalan lingkar dan pembuatan talud mengelilingi pulau ini. Kemudian terdapat empat buah tugu sebagai penanda supremasi kedaulatan NKRI yaitu, tugu Santiago, tugu Perbatasan, tugu benteng

Pancasila dan tugu yang belum terampung yang dibuat di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Tugu yang belum terampung tersebut sebenarnya namanya adalah tugu Megawati karena presiden RI saat itu Megawati Soekarnoputri yang akan meresmikannya. Namun, karena sampai pada masa jabatannya berakhir tugu tersebut belum terampung.

Adapun pembangunan tugu tersebut menelan anggaran miliaran rupiah, seperti yang diberitakan media online lokal Manado (Sulutlink) dalam judulnya "Patung Santiago Pertegas Pulau Miangas milik NKRI, patung Santiago dengan tinggi 7 meter dibangun dengan biaya 1,2 miliar rupiah.

Berbagai fasilitas yang dibangun oleh pemerintah di wilayah paling utara Sulawesi utara ini guna untuk membuka ruang isolasi serta sekaligus membuktikan kepedulian NKRI terhadap wilayah perbatasan, antara lain: dimulai dari fasilitas Pendidikan seperti: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) Taman Kanak-Kanak (TK), (3) Sekolah

Dasar (SD), (4) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan (5) Sekolah Menengah Kejuruan. Pembangunan-pembangunan lainnya adalah (1) kantor Koramil/POSAD, (2) Kantor Marinir/POSAL, (3) Kantor Perhubungan (Syahbandar), (4) Kantor Navigasi beserta dengan Mercusuar, (5) Kantor Kecamatan Khusus, (6) Kantor Kepolisian, (7) Kantor Karantina Kesehatan Provinsi SULUT, (8) Kantor Puskesmas, (9) PLTS dan PLTD, (10) Kantor Imigrasi, (11) kantor Bea Cukai, (12) Kantor Kepala Desa, (13) Kantor Perbatasan, (14) Kantor Dikpora, (15) Kantor Perpustakaan, (16) PLTS bantuan Menhan, (17) Pos Pertamina beserta empat buah tangki BBM, (18) Aula Perbatasan, (19) depot logistik serta kantor dinas Dolog, dan (20) Bandar Udara Miangas. Belum lagi sekarang dibangun dermaga untuk kapal Feri, proyek jalan lingkar dan proyek talud mengelilingi pulau Miangas. Terlalu banyak perhatian pemerintah terhadap pulau dengan luas sekitaran 3.15 km2 tersebut, sehingga bagi sebagian orang dikatakan bahwa

pemerintah terlalu baik terhadap pulau tersebut sehingga ada bangunan-bangunan yang tidak terpakai dan hanya menjadi tempat untuk para pemabuk.

Adapun dari beberapa fasilitas yang telah disebutkan di atas, yang dilengkapi dengan personil adalah fasilitas yang dibangun dalam rangka kerjasama antar kedua negara, antara lain petugas keimigrasian, Bea Cukai, Marinir dan Posal kedua belah pihak. Adapula fasilitas keamanan seperti dalam lingkungan TNI AD, ada yang bersifat terstruktur seperti Koramil, ada yang bersifat program Satuan Tugas yang bergantian secara bergiliran Yonif 712 serta Kepolisian. Begitu juga dengan kantor perhubungan (Syahbandar), dimana semua pegawai baik apartur pertahanan kemanan, para penyelenggara hubungan kerjasama antara kedua negara selalu siap ditempat. Namun sebaliknya, fasilitas-fasilitas aparatur sipil yang dibangun untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat hanya terbengkalai dan dibiarkan kosong akibatnya rusak dan terkesan hanyalah proyek mubazir.

Contohnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manado, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Miangas dari Departemen Kesehatan, sampai sekarang tidak terpakai hanyalah gedung usang tak berpenghuni. Kantor kepala Desa sampai sekarang tidak dipakai, sebab ketika peneliti mengamati keseharian dan mewawancarai sekretaris kecamatan khusus Miangas, dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara ia tetap berada dirumah dan melayani masyarakat di kediamannya. Aula Perbatasan juga sampai sekarang dibangun tanpa memiliki manfaat apa-apa sehingga terkesan tidak bermakna apa-apa, para masya-rakat juga sangat dikecewakan apalagi para tukang yang ikut campur dalam proses pemba-ngunan tersebut.

Selain hal di atas ada beberapa bangunan yang disediakan pemerintah sebagai tempat penampungan kebutuhan pokok masyarakat seperti, depot logistik, 4 buah tangki BBM. Depot logistik yang dibangun sejak tahun 2007 kurang lebih hampir sama dengan dengan aula perbatasan. Pada penelitian yang

dilakukan oleh Hoetagaol dkk (2012) dan Anaada (2013) dikatakan bahwa pada tahun tersebut bangunan depot logistik dari awal sejak pembangunannya sampai sekarang masih terbiar kosong dan tidak terpakai justru beralih fungsi sebagai tempat menampung semen. Masyarakat berharap ada perubahan serta perbaikan dari segi utilitas namun justru semakin parah, menjadi bangunan tua yang tidak layak pakai. Demikian halnya dengan 4 buah tangki BBM, yang sekarang hanya terlihat hanya ada 2 buah yang satunya lagi telah terbawa ombak dan yang satunya entah kemana, dua sisanya hanya terbiar sampai menjadi karatan. Demikian juga dengan fasilitas pendidikan, minimnya tenaga pengajar selalu menjadi keluhan dari masyarakat.

Berbeda dengan fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan sendiri sudah lebih baik dari sebelumnya. Dimulai dengan penyediaan tempat tinggal/asrama bagi perawat atau dokter yang datang dari luar daerah, bangunan baru yang mulai digunakan serta ketika peneliti turun langsung ke Pulau Miangas

bersamaan dengan para dokter dari program Nusantara Sehat yang dipelopori oleh Kementerian Kesehatan RI. Ada sekitar 5 dokter yang dikirim ke perbatasan di Miangas selama 7 hari pelayanan. Selama itupun para dokter-dokter dibantu dengan para tenaga medis di pulau tersebut melakukan kegiatan pengobatan gratis. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat setempat sehingga masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi untuk kegiatan ini. Untuk saat ini di pulau Miangas tersedia 5 tenaga medis dan 3 lainnya masih dalam status honor. Untuk masalah instalasi seperti instalasi listrik dan air juga sudah punya perkembangan terutama pada instalasi listrik. Sebelumnya untuk masalah listrik masyarakat Miangas hanya bisa menikmati listrik kurang lebih sekitar 16 jam yaitu antara dari pukul 15.00 WITA – 06.00 WITA (video profil Pulau Miangas oleh KKN Tematik Pulau Miangas Gel. 85 Unhas). Namun sekarang listrik dapat dinikmati 1x24 jam penuh. Adapun jika terjadi pemadaman itupun punya jeda kurang dari 10 menit karena

pihak PLN harus mengisi bahan bakar. Untuk instalasi air masyarakat sudah dapat mengakses air bersih tanpa harus menunggu jadwal antara 3 dusun yang ada.

Sebagaimana pembangunan yang terjadi pasti punya dampak baik itu dampak positif atau dampak negatif. Semisalnya pembangunan bandar udara Miangas. Bandar udara pertama yang berada di utara perbatasan Indonesia – Filipina ini mulai dibangun pada tahun 2012 dengan total anggaran Rp 275 miliar yang terdiri dari dana investasi regular sebesar Rp 200 miliar dan anggaran APBN senilai Rp 75 miliar (Tempo, 11 Oktober 2016) dan diresmikan oleh presiden RI Joko Widodo pada 19 Oktober 2016.

Pembangunan bandara ini masuk dalam program Nawa Cita yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI serta masuk juga dalam salah satu agenda visi dan misi presiden terpilih Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari garis depan dari pinggiran dan dari perbatasan (video Presiden Jokowi

Resmikan Bandara Miangas dari Kementrian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden) dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan juga sekaligus untuk membuka ruang isolasi bagi masyarakat perbatasan khususnya masyarakat Miangas itu sendiri sehingga akses untuk keluar masuk pulau ini sedikit dipermudah dibandingkan dengan akses untuk kapal laut yang jeda waktunya sekitar 2 minggu sekali. Sebagai pulau kecil dibibir pasifik, kondisi cuaca perairan sangat rentan terhadap badai dan gelombang yang menghambat distribusi pangan dan kebutuhan lainnya. Adapun penerbangan/maskapai saat ini adalah Wings Air dengan jenis pesawat ATR 72-500 ke Melonguane pada setiap hari minggu dengan waktu tempuh sekitar 25-30 menit.

Pembangunan bandar udara Miangas mendapat dukungan dari masyarakat Miangas sendiri, namun hal itu patut juga disesali karena hampir sebagian masyarakat Miangas kehilangan lahan khususnya tanaman kelapa. Pembuatan kopra merupakan

sebuah alternatif apabila para penduduk setempat tidak dapat melaut akibat gelombang laut yang tinggi.

Namun tidak selamanya sebuah bangunan yang dibuat tidak memiliki manfaat positif seperti bandar udara Miangas. Dengan dibuatnya bandar udara tersebut selain akses lebih mudah seperti yang telah diuraikan di atas, para pegawai-pegawai serta staf yang mengisi tempat di bandara tersebut adalah warga asli Miangas sehingga jumlah pengangguran yang ada dapat diminimalisir. Dengan adanya pembangunan bandara tersebut para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditempatkan di wilayah perbatasan Miangas diharapkan untuk lebih aktif dalam melayani masyarakat. Sebelum adanya bandar udara pihak-pihak yang menangani/membantu persoalan-persoalan masyarakat perbatasan terbatas karena aksesnya yang cukup lama sekitar 2 minggu sekali.

Pada dasarnya, pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dimana

pembangunan itu dilaksanakan sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersinergi guna menciptakan pembangunan yang bermakna dan berkualitas. Bukan justru sebaliknya yang hanya menimbulkan sebuah kesan yang tidak baik terhadap masyarakat setempat. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bersifat *bottom-up* bukan *top-down*. Yang artinya adalah pembangunan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri bukan justru secara hirarki diproses dan dilakukan oleh pemimpin tertinggi dan atas dasar dari keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat yang lebih rendah. Keputusan-keputusan tersebut memang dapat direalisasikan namun manfaatnya tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Miangas dikarenakan seperti yang telah disinggung di atas bahwa pembangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dimana penulis dalam hal

ini memfokuskan penelitian bagaimana makna pembangunan kawasan perbatasan Indonesia – Filipina bagi masyarakat Miangas? Serta apakah pembangunan tersebut berdampak positif atau justru sebaliknya hanya merugikan masyarakat Miangas sendiri, atau menghilangkan tradisi leluhur serta menjadikan masyarakat cenderung pragmatis. Pulau yang pernah memiliki lebih dari satu nama ini menjadi topik hangat dan menarik dalam setiap pembicaraan baik secara formal maupun informal, dan bahkan dalam setiap program pembangunan nasional diwacanakan Miangas sebagai “beranda depan” NKRI. Maka mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai “beranda depan” ataupun penamaan lain yang teralamatkan, seperti “benteng Pancasila”, “garda terdepan”, sampai didirikannya 4 buah tugu sebagai penanda supremasi pertahanan bangsa oleh pemerintah, hanyalah sebatas membangkitkan phobia nasionalisme semata, dan sekedar wacana dari pemerintah untuk mengisi lembar halaman dalam media cetak maupun online.
2. Program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, secara kasat mata memberi kemudahan bagi masyarakat di Miangas. Fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, hanya fasilitas yang menunjang kerjasama antar-ke dua negara yang sampai sekarang selalu siap ditempat. Sedangkan fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk pelayanan akan kebutuhan masyarakat hanyalah proyek mubazir, kosong dan hanya menjadi tempat rayap dan kepiting laut, selain itu Keterbatasan akan kebutuhan pendidikan dengan minimnya tenaga pengajar tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah.
3. Pembangunan yang dilakukan di pulau Miangas masih belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapatnya beberapa bangunan yang terbiar kosong dan tidak terpakai akhirnya pemba-

ngunan yang dilakukanpun tergolong mobazir.

4. Dengan hadirnya pembangunan-pembangunan serta fasilitas pelayanan kepada masyarakat, bukan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Malah oknum-oknum penyelenggara kekuasaan negara dengan mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan.
5. Ditengah-tengah keterisolasian dan keterbelakangan dengan faktor ekonomi yang rendah dan minimnya sumberdaya

manusia yang berkualitas, serta jauh dari pusat perekonomian yang tidak ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai, tidak adanya ketersediaan BBM untuk melaut, serta ketidaktersediaanya infrastruktur yang memadai membuat perekonomian masyarakat terlihat stagnan. Sehingga dengan adanya pengaruh budaya materialisme dan pemanjaan oleh pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Miangas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anaada, Z. T. M, 2013. *Kekuasaan Negara Dalam Struktur Adat Masyarakat Miangas*. Skripsi. Manado: Unsrat.
- Dahuri, R. 2015. *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Bogor: Roda Bahari.
- Geertz, C. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Harsojo. 1967. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binacipta
- Hoetagaol, S. M., Sumampouw, N. S. A., Parauba, J., Tuange, R., Pontororing, M. 2012. *Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Pebatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas, Kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado*. Yogyakarta: Kepel Press
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kusen, A. W. S. 2014. *Makna Kebudayaan Dalam Dinamika Antropologi*. Berita Manado. Diakses pada: 23 Maret 2017.
- Lombart, D. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya - Batas-Batas Pembaratan*. (terj.). Jakarta: PT Gramedia
- Tjiptadi, 1984. *Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta Yudistira.
- Pristiwanto., Sumolang, S., Triwibowo, A., Ulaen, A. J. 2013. *Legal Di Marore, Ilegal Di Tahuna (Kajian Atas Peredaran Barang Di Wilayah Lintas Batas Di Kabupaten Kepulauan Sangihe)*. Yogyakarta: Penerbit, Kepel Press.
- Riyadi dan D. S. Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Salindeho, W dan Sambowadile, P. 2008. *Kawasan Sangihe – Talaud – Sitaro: Daerah PerBATASan, KeterBATASan, PemBATASan*. Jogjakarta: FuSpaD.

- Soegijoko. 1994. *Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan, Jurnal PWK*. Nomor 15 Oktober 1994.
- Suparlan, P. 1997. Antropologi Pembangunan dalam *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Editor E.K.M. Masinambow. Halaman 61-67. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suryono, A. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM-Press.
- Tikson, D. T. 2005. *Indikator-Indikator Pembangunan Ekonomi*. <http://ecozone.html>. Diakses pada: Senin 18 April 2011.
- Ulaen, A. J., Wulandari, T., Tangkilisan, Y. B. T. 2012. *Sejarah Wilayah Perbatasan – Filipina 1928 – 2010; Dua Nama Satu Juragan*. Jakarta: Penerbit, Gramata Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Nusa Utara Dari Lintasan Niaga Ke Daerah Perbatasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_, Alinabur., Dukalang, A., Setiawan, C., Nugrahini, P. 2012. *Studi Tentang Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, Yogyakarta Penerbit, Kepel Press.